

dan pemanfaatan tanah bagi masyarakat pedesaan para petani tersebut selalu mengelolanya dengan baik. Adapun bagi para petani yang mempunyai tanah yang luas, tapi tidak mempunyai keahlian (skill) dalam bidang itu, maka dia menyuruh orang lain untuk menggarap/mengelolanya.

Dengan kenyataan tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa hal-hal yang mempengaruhi dalam terjadinya sewa-menyesewa tanah tambak adalah :

- Faktor pola berfikir masyarakat desa yang telah menunjukkan kemajuan untuk selalu memanfaatkan tanahnya, agar tidak sia-sia begitu saja.
- Faktor skill (keahlian) yang masih kurang dimiliki oleh pemilik tanah dalam perencanaan, pengelolaan, serta pemanfaatan lahan perikanan.
- Faktor ekonomi yang masih guna untuk mencukupi kebutuhan yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan.
- Faktor lingkungan yang sangat bagi masyarakat pedesaan untuk meningkatkan dan memanfaatkan lahan perikanan.

- b. Pengaruh mempengaruhi penyewa kepada pemilik tanah tambak.

Hidup bertani merupakan ciri khas bagi masyarakat pedesaan. Maka dari itu, bagi buruh tani yang tidak mempunyai tanah tambak sendiri, mereka menyewa kepada para petani tambak yang mempunyai lahan yang luas.

Untuk mendapatkan sewaan dari pihak pemilik tanah tambak, para penyewa mempunyai cara tersendiri untuk mempengaruhi kepada pemilik tanah tambak. Di antara cara mempengaruhi tersebut adalah :

- 1) Penyewa mendatangi pemilik tanah tambak di rumahnya

Mengingat akan pentingnya tanah pertanian bagi masyarakat pedesaan, maka bagi para petani tambak yang tidak memiliki tanah sendiri, mereka berusaha mendapatkan sewaan dari orang lain.

Untuk mendapatkan sewaan dari pemilik tanah tambak, mereka mendatangi sendiri ke rumah pemilik tanah tambak. Hal tersebut dirundingkan dengan jalan musyawarah penuh kekeluargaan. Dengan demikian penyewa bisa mengungkapkan apa yang menjadi kebutuhan mereka dan pemilik tanah tambak bisa memahami maksud kedatangan calon penyewa.

- 2) Penyewa menyewa tanah tambak kepada pemilik tanah tambak dengan harga yang lebih tinggi dari harga biasa.

Dalam menyewakan tanahnya, kadangkala pemilik tanah tambak menyewakan dengan jalan lelang. Hal tersebut dilakukan oleh pihak pemilik tanah tambak, dikarenakan banyaknya calon penyewa yang ingin menyewa tanah tambak kepadanya. Walaupun demikian, calon penyewa yang benar-benar ingin mendapatkan sewa tanah tambak tersebut, mereka mau membayar harga sewa yang lebih tinggi dari harga biasanya.

2. Proses transaksi sewa-menyewa tanah tambak.

a. Tawar menawar antara pemilik tanah tambak dengan penyewa.

Untuk menawarkan harga sewa tanah tambak kepada calon penyewa, maka pemilik tanah tambak menggunakan harga yang berlaku bagi masyarakat tersebut sesuai dengan lebar dan luasnya tanah tambak yang akan disewakan,

Penawaran harga sewa tanah tambak bagi warga desa tersebut sudah menjadi tata aturan pemerintahan desa. Dengan demikian antara pemilik tanah tambak dengan penyewa sama-sama tidak dirugikan, rela sama rela dan terciptalah suasana yang rukun antar sesamanya.

Adapun dasar tata aturan penetapan harga sewa tanah tambak di desa tersebut, berdasarkan atas tinggi rendahnya harga ikan, jika harga i-

2.1. Faktor ketidak sesuaian antara aqad dengan praktek penggarapan tanah sewanya, misalnya : sesuai perjanjian pemilik tanah tambak menyewakan hanya semata-mata untuk memelihara ikan saja, namun si penyewa mengingkari janjinya yaitu dengan memanaminya padi. Jadi tanah tambak tersebut tidak hanya untuk memelihara ikan saja, tetapi juga juga ditanami dengan padi.

2.2. Faktor ketidak tepatan waktu habisnya masa sewa, hal tersebut dikarenakan penyewa menanam tanah tambak dengan padi. Padahal umur antara ikan dengan padi adalah tidak sama.

Apabila di daerah tersebut terjadi suatu perselisihan antara pemilik tanah tambak dengan pihak penyewa, maka kepala desalah yang mendamaikannya, sesuai dengan tugasnya yaitu :

- 1). Melaksanakan tertib administrasi pemerintahan ditingkat desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2). Melaksanakan pembangunan dan pembinaan masyarakat.
- 3). Bertanggung jawab atas jalannya penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat di desa yang bersangkutan.

- 5). Melaksanakan keputusan-keputusan desa sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6). Menyelesaikan perselisihan-perselisihan - yang terjadi di desa yang bersangkutan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku - (Peraturan menteri dalam negeri No. 4 tahun - 1984 tentang hak, wewenang dan kewajiban kepala desa bab III pasal 4).

Adapun bentuk tindakan kepala desa beserta aparatnya dalam menyelesaikan pertikaian antara pemilik tanah tambak dengan penyewa di desa Betoyo Guci adalah :

- Kepala desa mengundang kedua belah pihak - yang bertikai untuk datang ke kantor kelurahan desa. Di situ kepala desa bertindak secara tegas untuk mencari duduk permasalahannya yang menyebabkan terjadinya perselisihan. Dengan demikian kepala desa mengetahui siapa - yang benar dan siapa yang salah.
- Setelah diketahui siapa yang benar dan siapa yang salah, maka kepala desa menyuruh kepada orang yang bersalah untuk memberikan ganti - kepada pihak yang dirugikan.